

RENCANA KERJA (RENJA)



**KECAMATAN WOTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN WOTU

Jl. Andi Pandangai No. 1 Pos 92971

KEPUTUSAN CAMAT WOTU
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN WOTU TAHUN 2022

CAMAT WOTU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Kerja Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dan menyelaraskan dengan RENSTRA 2021-2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Wotu Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan

fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT WOTU TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN WOTU TAHUN 2022**

- KESATU** : Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Wotu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Keputusan camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wotu
pada tanggal : 21 Juni 2021
Plt. Camat,



ISKANDAR MUDA, M.Si

Pangkat: Pembina

NIP : 19751030 200803 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur akhirnya selesai kami susun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

Rencana Kerja pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis pula. Renja ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada Hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022 dengan tetap memperhitungkan RENSTRA 2021-2026 serta berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis didalamnya mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan.

Kami berharap RENJA ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas pada Kantor Kecamatan Wotu. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Kecamatan Wotu masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan RENJA ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah Azza Wajalla selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Wotu, 21 Juni 2021

Plt. CAMAT,



ISKANDAR MUDA, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19751030 200803 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja disusun sesuai usulan program dan kegiatan yang didukung dengan data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi SKPD.

Rencana Kerja Kecamatan Wotu tahun 2022, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu “ **Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama Dan Budaya** ”. Dalam proses pencapaian visi tersebut, penyusunan Renja SKPD berdasarkan Misi Pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu “ Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik”. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Wotu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penetapan dokumen RENJA SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu antara lain:

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Renja, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Kantor Kecamatan Wotu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
2. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2022.

Renja Kantor Kecamatan Wotu Tahun 2022 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Wotu. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tentunya diperlukan perencanaan yang baik, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan hukum Kantor Kecamatan Wotu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu TImur Nomor 2 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor); dan
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wotu Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Wotu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rencana Kerja Kecamatan Wotu Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022. Selain itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wotu Tahun 2022 dimaksudkan adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Kantor Kecamatan Wotu kedalam program/kegiatan tahunan.
2. Menjadi acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2022 dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana Kecamatan Wotu Tahun 2022
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2022.
6. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Wotu.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kantor Kecamatan Wotu
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Wotu
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Wotu Tahun 2022
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Wotu Tahun 2022
5. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur

6. Sebagai pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Wotu Tahun 2022
7. Sebagai penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2022

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN WOTU TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Wotu
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Wotu
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Wotu
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN WOTU

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Wotu
- 3.3 Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Wotu

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN WOTU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Wotu

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur

Pengukuran laporan kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan konsep yang memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Indikator masukan (input), untuk mengukur sumberdaya seperti anggaran (dana),SDM, Peralatan, material dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan
2. Indikator keluaran (output), merupakan indicator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
3. Indikator hasil (outcome), merupakan indicator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Wotu Tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada table T-C. 29 atau table 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Wotu dan Pencapaian Renstra
Kantor Kecamatan Wotu s/d Tahun 2021 Kabupaten Luwu Timur
Kantor Kecamatan Wotu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	95	95	95	100	95	95	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Diagendakan (Lembar)	336	336	336	336	100	380	380	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening bulanan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang terbayarkan (Rekening)	48	48	48	48	100	48	48	100

	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa (Jenis)	2	2	2	2	100	2	2	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (Orang)	3	3	3	3	100	3	3	100
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang di perbaiki (Unit)	13	11	13	11	84.61	43	43	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK Yang Disediakan (Jenis)	27	27	27	27	100	27	27	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan (Jenis)	9	9	9	9	100	9	9	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan (Jenis)	9	9	9	9	100	10	9	90
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan (eksampler)	72	79	72	79	109.72	60		84
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan (Jenis)								
	penyediaan makan minum	Jumlah Makan Minum Yang Disediakan (Kotak)	3370	2370	3370	2370	70.32	6276		100

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (Kali)	24	17	24	17	70.83	24	24	100
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi / teknis yang terbayarkan (orang)	7	5	7	5	71.42	5	5	100
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (kali)	725	503	725	503	69.37	980	980	99
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Caapaian Kinerja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpenuhi	97	97	97	97	100	97	97	100
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan (Unit)								
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan (Unit)								
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (Jenis)	6	6	6	6	100	6	6	100
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara (Unit)	1	1	1	1	100	1	1	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di pelihara (unit)	2	2	2	2	100	2	2	100

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	8	8	8	8	100	12	8	66.67
	Pengadaan peralatan rumah jabatan /Dinas	Jumlah Peralatan yang diadakan (Unit)	8	8	8	8	100	8	8	100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ()	0							
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang undangan (Orang)	0	0	0	0	0	3	0	0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu	100							
	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (dokumen)	1	1	1	1	100	1	1	100
	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD tang disusun tepat waktu	100							

	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen)	6	6	6	6	100	6	6	100
	Program Peningkatan Pelayanan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa ()	95	95	95	95	100	95	95	100
	Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Partisipasi Masyarakat Rasio Persentase Keterwakilan Perempuan dan Laki Laki Dalam Pelaksanaan Musrembang Kecamatan (Rasio)	0.39	0.39	0.39	0.39	100	0.39	0.39	100
	Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Persentase desa yang terfasilitasi rancangan Perdes APBDes (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Peran Serta Perempuan dalam Membangun Masyarakat Desa	Persentase PKK Desa Yang Dibina (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Program Peningkatan Pelayanan Mendukung Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan ()	100							

	Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Dokumen)	4	4	4	4	100	4	4	100
	Program Peningkatan Pelayanan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban ()	100							
	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Kasus Pengaduan Yang Ditindak Lanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum ()	100	90	100	90	100	90	100	90
	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan	Jumlah Administrasi Perizinan yang dikeluarkan (Lembar)	200	180	200	180	90	200	180	90



Pada tahun 2020 Kantor Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur melaksanakan 9 (Sembilan) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Dari program dan kegiatan tersebut, ada beberapa program dan kegiatan yang terealisasi 100% dan ada juga yang kurang 100%, adapun capaiannya adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

➤ **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Adapun Target dari kegiatan ini adalah jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagendakan dengan target kinerja sebanyak 336 Lembar dan teralisasi 336 Lembar (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 2.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.972.000 (98.60%)

➤ **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Adapun Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya rekening listrik, air dan telepon dan Faximile dengan target kinerja sebanyak 48 rekening dan teralisasi 48 rekening (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 57.600.000 dan terealisasi sebesar Rp. 52.950.000 (91.93%)

➤ **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Adapun Target dari kegiatan ini adalah terwujudnya kelancaran kegiatan kantor Kecamatan Kalaena dengan target kinerja sebanyak 2 jenis dan teralisasi 2 jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 5,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 975.000 (19.50%)

➤ **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor setiap bulannya dengan target kinerja sebanyak 3 Orang dan terealisasi sebanyak 3 Orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 44.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 43.690.750 (98.15%)

➤ **Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja**

Target dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan kantor dengan target kinerja sebanyak 13 unit dan terealisasi sebanyak 13 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 4.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.000.000 (100%)

➤ **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Target dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor dengan target kinerja sebanyak 9 jenis dan terealisasi sebanyak 9 jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.650.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.645.000 (99.86%)

➤ **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Target dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan surat kabar dengan target kinerja sebanyak 72 exemplar dan terealisasi sebanyak 72 exemplar (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 8.700.000 dan terealisasi sebesar Rp. 8.690.500 (99,89%).

➤ **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah**

Target dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target kinerja 24 kali dan terealisasi sebanyak 21 kali (87.50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 90.095.000 dengan realisasi sebesar Rp. 74.315.400 (82.49%)

➤ **Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis**

Target dari kegiatan ini terlaksananya pembayaran honorarium upah jasa dengan target kinerja sebanyak 7 orang dan terealisasi sebanyak 7 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 78.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 72.000.000 (92.31%)

➤ **Kunjungan Kerja Dalam Daerah**

Target dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kunjungan kerja dalam daerah dengan target kinerja sebanyak 725 kali dan terealisasi sebanyak 625 (86.21%) dengan target anggaran sebesar Rp. 111.982.800, dan terealisasi sebesar Rp. 96.264.700 (85.96%)

➤ **Penyediaan Makan dan Minum**

Target dari kegiatan ini adalah terselenggaranya penyediaan konsumsi dalam daerah dengan target kinerja sebanyak 3370 Kotak dan terealisasi sebanyak 3211 Kotak (95.28%) dengan target anggaran sebesar Rp. 124.500.000, dan terealisasi sebesar Rp. 18.175.000 (94,92%)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

➤ **Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas**

Target kegiatan ini adalah jumlah peralatan rumah dinas yang diadakan dengan target kinerja sebanyak 8 unit dan terealisasi sebanyak 8 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 16.980.000 dan Terealisasi sebesar Rp. 16.980.000 (100%)

➤ **Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Target kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor dengan target kinerja sebanyak 6 Unit dan terealisasi sebanyak 6 Unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 45.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 45.500.000 (100%).

➤ **Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan**

Target Kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan rumah jabatan dengan target kinerja sebanyak 1 Unit dan realisasi 1 Unit (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 25.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 24.340.000 (97.36%).

➤ **Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor**

Target Kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan rumah jabatan dengan target kinerja sebanyak 1 Unit dan realisasi 1 Unit (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 13.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 12.350.000 (95%).

➤ **Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operational**

Target Kegiatan ini adalah tersedianya Pengadaan gedung kantor dengan target kinerja sebanyak 8 unit dan realisasi 8 unit (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 47.994.152 dan realisasi sebesar Rp. 45.146.960 (94,07%).

➤ **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah jabatan Dinas**

Target Kegiatan ini adalah tersedianya Pengadaan gedung kantor dengan target kinerja sebanyak 5 Unit dan realisasi 5 Unit (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 2.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.000.000 (100%).

3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - **Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Target dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 8.400.000 dan terealisasi sebesar Rp 5.320.000 (63.33%)
4. **Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**
 - **Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD**

Target dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD dengan target kinerja sebanyak 6 dokumen dan terealisasi sebanyak 6 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 12.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 9.886.000 (63.33%)
5. **Program Peningkatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa**
 - **Fasilitasi pendampingan aspirasi masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan**

Target dari kegiatan yaitu terakomodirnya usulan rencana program prioritas desa/kelurahan dengan target kinerja sebanyak 0,39 Rasio dan terealisasi sebanyak 0,39 Rasio (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 18.425.600 dan terealisasi sebesar Rp. 18.375.000 (99.73%)
 - **Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes**

Target dari kegiatan yaitu tersusunnya rancangan peraturan APBDes dengan target kinerja sebanyak 100 Persen dan terealisasi sebanyak 100 Persen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 16.189.900 dan terealisasi sebesar Rp. 13.497.500 (83.37%)
 - **Fasilitasi Peran Serta Perempuan Dalam Membangun Masyarakat Desa**

Target kinerja sebanyak 100 Persen dan terealisasi sebanyak 100 Persen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 55.338.747 dan terealisasi sebesar Rp. 53.965.000 (97.52%)

6. Program Peningkatan Mendukung Pemerintahan

➤ **Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan**

Target dari kegiatan yaitu terlaksananya rapat koordinasi dengan rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebanyak 100 Persen dan terealisasi sebanyak 100 Persen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 45.150.000 dan terealisasi sebesar Rp. 43.949.400 (97.34%)

➤ **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Target dari kegiatan yaitu tertibnya administrasi desa dengan target kinerja sebanyak 4 Dokmen dan terealisasi sebanyak 4 Dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 31.720.000 dan terealisasi sebesar Rp. 31.130.000 (98.14%)

7. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban

➤ **Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat**

Target dari kegiatan yaitu tertanganinya kasus-kasus yang ada dengan target kinerja sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100% (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 11.545.000 dan terealisasi sebesar Rp. 11.455.500 (99.22%)

8. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum

➤ **Fasilitasi pelayanan administrasi perizinan**

Target dari kegiatan yaitu tertibnya administrasi perizinan dengan target kinerja sebanyak 200 Izin dan terealisasi sebanyak 180 Izin(90%) dengan target anggaran sebesar Rp. 16.528.500 dan terealisasi sebesar Rp. 13.083.00 (79.15%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Wotu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (infac). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Yang terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dan tingkat capaiannya dapat dilihat pada Tabel T-C. 30 atau tabel 2.2 sebagai berikut :

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-3)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(tnn+n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		0	69	71.4	74	77	77	70	79	85	85	85	
2	Nilai LAKIP		0	42.07	50	55	60.5	60.5	42.07	70.02	60	59.44	60.05	

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Kalaena sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wotu

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2019 dengan tahun 2020 terkait pelayanan publik di Kecamatan Kalaena. Target dan realisasi pelayanan publik dengan menggunakan peraturan Menpan dan RB nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat. Pada Tahun 2019 Kantor Kecamatan Wotu menggunakan survey kepuasan masyarakat dengan nilai IKM yaitu 85. Sedangkan pada Tahun 2020 dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 77 dan terealisasi 85.

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wotu

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2019 dengan tahun 2020 terkait akuntabilitas kinerja di Kecamatan Wotu. Pada tahun 2019 target dan realisasi nilai LAKIP dengan target 55 dan terealisasi B (60) dan tahun 2020 dengan target nilai B (60.5) dan terealisasi dengan nilai CC (59.44) telah memenuhi target yang diperjanjikan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2021 antarlain :

1. Kualitas sumber daya manusia masih kurang
2. Sarana dan prasarana masih kurang
3. Sistem dan prosedur kerja yang belum maksimal
4. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
5. Seringnya terjadi pelanggaran terkait IMB
6. Pemilihan Kepala Desa Serentak yang diselenggarakan pada tahun 2021

7. Kurang berfungsinya peran Kecamatan dalam tatanan organisasi Kabupaten terkait hirarki dan koordinasi dalam struktur Pemerintahan Desa
8. Adanya Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak berbagai aspek dan pola hidup

2.3.1 Rekomendasi dan Catatan Strategis

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana
- c. Meningkatkan kinerja aparat kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagai urusan kewenangan bupati kepada camat
- d. Mengadakan pembinaan terhadap SDM aparat Kecamatan dan perangkat desa dalam peningkatan kinerja Kecamatan dan pemerintahan desa
- e. Melakukan sosialisasi terkait pentingnya IMB
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap prose Pemilihan Kepala Desa Serentak yang diselenggarakan pada tahun 2021
- g. Menfungsikan kembali Hirarki tata pemerintahan yang proporsional dengan pengawasan dan pengendalian yang persuasife
- h. Menerapkan Protokol Kesehatan (COVID-19) dan *Social Distancing* dalam penyelenggaraan pemerintahan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur. Perencanaan yang dilakukan oleh lembaga atau

organisasi/perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum perangkat daerah serta musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat daerah.

Review adalah aktifitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Wotu serta mengacu pada Renja Perangkat daerah (RKPD). Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas Flapon Anggaran Sementara (PPAS).

Rancangan awal Renja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra SKPD dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang.

Adapun perbandingan antara Rencana Awal Renja 2022 dengan Hasil analisa Kebututuhan Kantor Kecamatan Kalaena Kab. Luwu Timur tahun 2022 dapat dilihat pada table T-C.31 atau tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2022 (Permendagri 13 Tahun 2006)
Kantor Kecamatan Wotu

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	3,014,346,384	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	3,836,625,578	
2.1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	WOTU	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	24,714,885	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	WOTU	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	25,780,180	
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	WOTU	jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dok.	4,650,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	WOTU	jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dok.	3,666,325	
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	WOTU	Jumlah dokumen RKA -SKPD yang disusun	2 Dok.	4,179,885	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	WOTU	Jumlah dokumen RKA -SKPD yang disusun	2 Dok.	4,179,885	

2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	WOTU	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 Dok	5,345,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	WOTU	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 Dok	4,500,000	
2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	WOTU	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dok	10,540,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	WOTU	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dok	13,433,970	
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,166,033,217					2,830,900,740	
2.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	WOTU	Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan	24 Orang	2,137,053,217	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	WOTU	Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan	24 Orang	2,801,920,740	
2.2.7	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	WOTU	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	12 Dok	28,980,000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	WOTU	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	12 Dok	28,980,000	
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				13,110,000					13,360,188	
2.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	WOTU	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dok	13,110,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	WOTU	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dok	13,360,188	

2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	13,580,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	21,175,880	
2.4.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	WOTU	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah perangkat daerah	4 Dok	13,580,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	WOTU	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah perangkat daerah	4 Dok	21,175,880	
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	20,312,300	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	45,478,450	
2.5.2	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	WOTU	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	0 Orang	0	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	WOTU	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	33 Orang	15,000,000	
2.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	WOTU	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	4 Dok	3,457,300	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	WOTU	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	4 Dok	5,583,450	
2.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	WOTU	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	16,855,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	WOTU	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	24,895,000	

2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100%	197,859,700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100%	422,648,900	
2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	WOTU	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 Jenis	2,134,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	WOTU	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 Jenis	3,394,600	
2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	WOTU	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	8 Jenis	6,525,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	WOTU	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	8 Jenis	13,285,000	
2.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	WOTU	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	3 Jenis	5,950,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	WOTU	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	3 Jenis	10,390,300	
2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	WOTU	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Eksamp lar	3,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	WOTU	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Eksamp lar	6,600,000	
2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	WOTU	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	1500 Orang	72,675,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	WOTU	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	1500 Orang	95,900,00	
2.6.9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	WOTU	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah yang diselenggarakan	831 Kali	107,075,000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	WOTU	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah yang diselenggarakan	600 Kali	293,079,000	

2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100%	306,950,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100%	65,000,000	
2.7.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	WOTU	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 Unit	278,450,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	WOTU	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	0 Unit	0	
2.7.5	Pengadaan Mebel	WOTU	Jumlah mebel yang diadakan	0 Unit	0	Pengadaan Mebel	WOTU	Jumlah mebel yang diadakan	0 Unit	0	
2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	WOTU	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang diadakan	1 Unit	28,500,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	WOTU	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang diadakan	0 Unit	0	
2.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	WOTU	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0 Paket	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	WOTU	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Paket	65,000,000	
2.7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	WOTU	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	WOTU	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0 Unit	0	

2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	247,916,282	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	245,131,240	
2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	WOTU	Jumlah surat yang masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	650 Lembar	7,142,400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	WOTU	Jumlah surat yang masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	650 Lembar	9,581,240	
2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	WOTU	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayarkan	48 Rek.	55,748,882	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	WOTU	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayarkan	48 Rek.	65,000,000	
2.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	WOTU	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	3 Jenis	5,025,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	WOTU	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	3 Jenis	14,550,000	
2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	WOTU	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan	14 Orang	180,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	WOTU	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan	8 Orang	156,000,000	

2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	23,870,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	167,150,000	
2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	WOTU	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	13,395,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	WOTU	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	19,150,000	
2.9.5	Pemeliharaan Mebel	WOTU	Jumlah Mebel yang dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan Mebel	WOTU	Jumlah Mebel yang dipelihara	0 Unit	0	
2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	WOTU	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang dipelihara	9 Unit	5.730,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	WOTU	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit	135,000,000	
2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	WOTU	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab yang dipelihara	1 Unit	4,745,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	WOTU	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab yang dipelihara	1 Unit	13,000,000	
2.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	WOTU	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab yang dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	WOTU	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab yang dipelihara	0 Unit	0	

2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	9,985,000	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	14,643,012	
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	9,985,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	14,643,012	
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	WOTU	Jumlah adminitrasi perizinan yang dikeluarkan	0 Lembar	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	WOTU	Jumlah adminitrasi perizinan yang dikeluarkan	0 Lembar	0	
2.4.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	WOTU	Jumlah Volume sampah yang terangkut	150 Lembar	9,985,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	WOTU	Jumlah Volume sampah yang terangkut	150 Lembar	14,643,012	
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan	100%	52,879,384	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan	100%	84,710,099	
3.02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	100%	52,879,384	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	100%	8384,710,099	

3.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	WOTU	Persentase angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	0,38%	9,479,244	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	WOTU	Persentase angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	0,38%	16,309,244
3.2.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	WOTU	Jumlah PKK Desa yang diberdayakan	90 Orang	43,400,140	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	WOTU	Jumlah PKK Desa yang diberdayakan	90 Orang	68,400,855
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil diselesaikan	100%	12,250,000	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil diselesaikan	100%	16,000,000
4.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase penyelesaian kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	4,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase penyelesaian kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	6.000.000
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	WOTU	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan social yang difasilitasi	12 Kali	4,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	WOTU	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan social yang difasilitasi	12 Kali	6,000,000
4.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	WOTU	Jumlah kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	12 Kali	4,000,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	WOTU	Jumlah kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	12 Kali	5,000,000

4.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	4,250,000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	5,000,000	
4.2.1	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	WOTU	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	24 Kali	4,250,000	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	WOTU	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	24 Kali	5,000,000	
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	24,048,689	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	45,838,949	
5.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	24,048,689	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	45,838,949	
5.2.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	WOTU	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	24,048,689	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	WOTU	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	45,838,949	

6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	32,862,818	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	54,168,773	
6.02	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	100%	32,862,818	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	100%	54,168,773	
6.2.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	WOTU	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	34 Dok	7,731,910	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	WOTU	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	34 Dok	10,411,910	
6.2.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	WOTU	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	5,297,782	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	WOTU	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	10,547,782	
6.2.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	WOTU	Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya	100%	15,203,126	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	WOTU	Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya	100%	27,209,081	

6.2.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	WOTU	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan	1 Desa	4,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	WOTU	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan	100%	6,000,000	
TOTAL					3,146,372,275	TOTAL					5,253,625,474



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan merupakan forum strategis yang melibatkan semua unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu Timur baik dari unsur pemerintah maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan dimulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan diteruskan pada tingkat Provinsi dan Nasional. Musrenbang Kecamatan Kalaena dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2021 dengan peserta musrenbang yaitu 135 Orang, Terdapat kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat Kecamatan Wotu yang terdiri atas 16 Desa dan yang diakomodir menjadi satu dokumen prioritas usulan yang kemudian menjadi usulan kegiatan rencana pembangunan Tahunan Kecamatan Wotu yang selanjutnya diteruskan ke Bappelitbangda untuk menjadi bahan penyusunan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat yang didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu ***“Luwu Timur Berkelanjutan Dan Maju Berlandaskan Agama Dan Budaya”***. Hal tersebut perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Permasalahan yang kadang terjadi dari tahun ke tahun adalah perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD belum sepenuhnya tersosialisasi sampai ke tingkat Desa sehingga sinkronisasi perencanaan dari tingkat Desa ke tingkat Kecamatan belum maksimal antara program yang tertuang di RPJMD dan kebutuhan pembangunan di tingkat Desa masih saja belum seiring dalam mekanisme perencanaan dipadukan dengan hasil-hasil reses perorangan oleh para anggota DPRD yang notabene mengakomodir keinginan-keinginan dari masyarakat bukan mengacu ke kebutuhan yang sifatnya prioritas.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan untuk Kantor Kecamatan Wotu dapat dilihat pada tabel T-C.32 atau tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.4

**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kantor Kecamatan Wotu**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume		Catatan
				Volume Usulan	Pagu Usulan (Rp)	
BAHARI						
1	Pembangunan Jembatan Beton	Dsn. Bunga Pantai, Desa Bahari Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Unit	600,000,000	
2	Pembangunan Drainase	Dsn. Bunga-Bunga, Desa Bahari Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		300 Meter	300,000,000	
BAWALIPU						
3	Pengaspalan Jalan	Jl. Sangkuruwira, Jl. Setiakawan 2, Jl. Bahari Desa Bawalipu Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Km	2,000,000,000	
4	Pembentukan dan Peningkatan Jalan Produksi (JAPRO)	Dsn. Salualla Desa Bawalipu Kabupaten Luwu Timur		1 Paket	250,000,000	
CENDANA HIJAU						
5	Pembangunan Drainase	Jl. Poros Pepuro Utara Desa Cendana Hijau Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		200 Meter	300,000,000	
6	Pembentukan dan Peningkatan Jalan Tani (JUT)	Dsn. Pepuro Utara II dan Dsn. Pepuro Utara III Desa Cendana Hijau Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Paket	300,000,000	
LERA						
7	Pembangunan Drainase	Dusun Cendana Hijau II Desa Lera Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Kegiatan	200,000,000	
8	Pembentukan dan Peningkatan Jalan Tani (JUT)	Desa Lera Kec. Wotu Kabupaten Wotu		1 Kegiatan	300,000,000	
BALO-BALO						
9	Pengaspalan Jalan	Jl. Poros Desa Balo-Balo Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		2,5 Km	2,500,000,000	

10	Pembangunan Drainase	Dsn. Lambu-Lambu dan Apala Desa Balo-Balo Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		2,5 Km	500,000,000	
LAMPENAI						
11	Pembangunan Bronjong	Sungai Dsn. Kau Desa Lampenai Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Paket	300,000,000	
12	Pembentukan dan Peningkatan Jalan Tani (JUT)	Dusun Lembo Harapan, Dusun Tenri Sannae Dan Dusun Ujung Sari Desa Pertasi Kencana		1 Kegiatan	250,000,000	
MADANI						
13	Pengaspalan Jalan	Jl. Budi Utomo Desa Madani Kec. Wotu Kabupaten luwu Timur		1 Paket	2,000,000,000	
14	Perbaikan Rumah tidak Layak huni (Bedah Rumah)	Desa Madani Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Kegiatan	100,000,000	
MARAMBA						
15	Pembangunan Lining/Saluran Pembuangan	Dsn. Jateng Desa Maramba Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Kegiatan	200,000,000	
16	Pembentukan dan Peningkatan Jalan Tani (UJT)	Dsn. NTB Desa Maramba Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 kegiatan	300,000,000	
TARENGGE						
17	Pembangunan Jembatan	Dsn. Segitiga Emas Desa Tarengge Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Paket	567,000,000	
18	Pembentuksn dan peningkatan Jalan tani	Dsn. Tarengge Desa Tarengge Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		200 Metet	200,000,000	
TARENGGE TIMUR						
19	Pembangunan Proteksi	Jl. B. Kali Dsn. Rantetiku Desa Tarengge Timur Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		200 Meter	500,000,000	
20	Pembangunan Jaringan Irigasi (JIDES)	Jl. YR. Solang Dsn. Rantetiku Desa Tarengge Timur Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Kegiatan	200,000,000	
KANAWATU						
21	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa	Desa Kanawatu Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Paket	350,000,000	
22	Pembangunan Bronjong	Desa Kanawatu Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		250 Meter	235,000,000	

KARAMBUA						
23	Pengerasan Jalan dalam Pemukiman	Desa Karambua Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Kegiatan	200,000,000	
24	Pembentukan dan peningkatan Jalan Tani (JUT)	Dsn. Karambua 1 Timur Desa Karambua Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Kegiatan	200,000,000	
KALAENA						
25	Pembangunan Jalan Beton	Jl. Syarif Al-Qadry Dsn. Kunyi-Kunyi Desa Kalaena Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		500 M	1,000,000,000	
26	Pembentukan dan Peningkatan Jalan Produksi (JAPRO)	Dsn. Bunga Tana Desa Kalaena Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Kegiatan	300,000,000	
TABAROGE						
27	Pembangunan Proteksi	Jl. Muhammadiyah Ds. Bau-Bau Desa Tabaroge Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Kegiatan	250,000,000	
28	Penataan Halaman Puskesmas/Pustu	Dsn. Tabaroge Desa Tabaroge Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Paket	150,000,000	
PEPURO BARAT						
29	Pembangunan Jembatan	Dsn. Mertanadi Desa Pepuro Barat Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Unit	400,000,000	
30	Pembangunan Drainase	Dsn. Wanasari Desa Pepuro Barat Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Paket	200,000,000	
RINJANI						
31	Pembangunan Jembatan	Dsn. Sumali Desa Rinjani Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Unit	400,000,000	
32	Pembangunan Jalan Irigasi (JIDES)	Desa Rinjani Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur		1 Kegiatan	200,000,000	
TOTAL (Rp)					15,752,000,000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Arah Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut :

- a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional;
- b. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik
- c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip structure follow action;
- b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;
- c. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM Aparatur;
- d. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi
- b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi
- c. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan pusat dan daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Tujuan dalam Renja ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu menjadikan **“Luwu Timur Berkelanjutan Dan Maju Berlandas Nilai Agama Dan Budaya”** sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Wotu Kab. Luwu Timur adalah **Misi Ke-4 yaitu Menciptakan Kepemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik.**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dalam Renja ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk satu tahun kedepan.

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Wotu adalah

peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesional aparatur Kecamatan Wotu dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2021, pelaksanaan Kinerja kecamatan Kalaena Tahun 2021 ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk belanja pegawai dan belanja langsung yang terdiri dari belanja langsung urusan wajib dan pilihan (program) dengan ruang lingkup kegiatannya. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Wotu. Maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat meliputi Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa meliputi Sub Kegiatan :
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum meliputi Sub Kegiatan :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
13. Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan

15. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi Sub Kegiatan :

- Fasilitas penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
- Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan

Adapun Rencana Program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.33 atau Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Wotu Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur (Permendagri 13 Tahun 2006)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7			Non Urusan						
7	0		-						
7	01	1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	3,014,346,275		100%	3,836,625,578
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	24,714,885			100%	25,780,180
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	WOTU	Jumlah dokumen perencanaan Kecamatan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	4,650,000	Pendapatan Daerah		3 Dokumen	3,666,325
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	WOTU	Jumlah dokumen RKA Kecamatan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	4,179,885	Pendapatan Daerah		2 Dokumen	4,179,885

7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	WOTU	Jumlah dokumen DPA Kecamatan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	5,345,000	Pendapatan Daerah		2 Dokumen	4,500,000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	WOTU	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	10,540,000	Pendapatan Daerah		10 Dokumen	13,433,970
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2,166,033,217				2,830,900,740
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	WOTU	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	24 Orang	2137,053,217	Pendapatan Daerah		24 Orang	2,801,920,740
7.01.01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	WOTU	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	28,980,000	Pendapatan Daerah		12 Dokumen	28,980,000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar		13,110,000				13,360,188
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	WOTU	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah kecamatan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	13,110,000	Pendapatan Daerah		4 Dokumen	13,360,188
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat daerah		13,580,000	Pendapatan Daerah			21,175,880

7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	WOTU	Jumlah Dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	4 Dokumen	13,580,000	Pendapatan Daerah		4 Dokumen	21,175,880
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	20,312,300				45,478,450
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	WOTU	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	0	0	Pendapatan Daerah		33 Orang	15,000,000
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	WOTU	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	4 Dokumen	3,457,300	Pendapatan Daerah		4 Dokumen	5,583,450
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	WOTU	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	16,855,00	Pendapatan Daerah		3 Orang	24,895,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100%	197,859,700				422,648,900
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	WOTU	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 Jenis	2,134,700	Pendapatan Daerah		9 Jenis	3,394,600

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	WOTU	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	8 Jenis	6,525,000	Pendapatan Daerah		8 Jenis	13,285,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	WOTU	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	3 Jenis	5,950,000	Pendapatan Daerah		3 Jenis	10,390,300
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	WOTU	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Eksamplar	3,500,000	Pendapatan Daerah		48 Eksamplar	6,600,000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	WOTU	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	1500 Orang	72,675,000	Pendapatan Daerah		1500 Orang	95,900,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	WOTU	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang diselenggarakan	600 Kali	107,075,000	Pendapatan Daerah		600 Kali	293,079,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100%	306,950,000				65,000,000
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	WOTU	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit	278,450,000	Pendapatan Daerah		0	0
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	WOTU	Jumlah mebel yang diadakan	0	0	Pendapatan Daerah		0	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	WOTU	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan		28,500,000	Pendapatan Daerah		0	0

7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasaranana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	WOTU	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0 Unit	0	Pendapatan Daerah		1 Paket	65,000,000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasaranana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	WOTU	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	0 Unit	0	Pendapatan Daerah		0 Unit	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	247,916,282				245,131,240
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	WOTU	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	650 Lembar	7,142,400	Pendapatan Daerah		650 Lembar	9,581,240
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	WOTU	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	48 Rekening	55,748,882	Pendapatan Daerah		48 Rekening	65,000,000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	WOTU	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	3 Jenis	5,025,000	Pendapatan Daerah		3 Jenis	14,550,000
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	WOTU	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	10 Orang	180,000,000	Pendapatan Daerah		10 Orang	156,000,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		23,870,000				167,150,000

7.01.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	WOTU	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	13,395,000	Pendapatan Daerah		8 Unit	19,150,000
7.01.01.2.09.05				Pemeliharaan Mebel	WOTU	Jumlah mebel yang dipelihara	0 Unit	0	Pendapatan Daerah		0 Unit	0
7.01.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	WOTU	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit	5,730,000	Pendapatan Daerah		8 Unit	135,000,000
7.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	WOTU	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	4,745,000	Pendapatan Daerah		1 Unit	13,000,000
7.01.01.2.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	WOTU	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	0	Pendapatan Daerah		0 Unit	0
7	01	02		Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	9,985,000				14,643,012
7.01.02.2.04				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	WOTU	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	9,985,000				14,643,012

7.01.02.2.04.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	WOTU	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan	0	0	Pendapatan Daerah	0	0
7.01.02.2.04.03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	WOTU	Jumlah volume sampah yang terangkut	150 Lembar	9,985,000	Pendapatan Daerah	150 Lembar	14,643,012
7	01	03		Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan	100%	52,879,384			84,710,099
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	100%	52,879,384		100%	84,710,099
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	WOTU	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Pembangunan Daerah	0,38%	9,479,244	Pendapatan Daerah	0,38%	16,309,244
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	WOTU	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	90 Orang	43,400,140	Pendapatan Daerah	90 Orang	68,400,855
7	01	04		Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil diselesaikan	0%	12,250,000		100%	16,000,000

7.01.04.2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase penyelesaian kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	8,000,000			100%	11,000,000
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	WOTU	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi	12 Kali	4,000,000	Pendapatan Daerah		12 Kali	6,000,000
7.01.04.2.01.02				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	WOTU	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan	12 kali	4,000,000	Pendapatan Daerah		12 kali	5,000,000
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	0%	4,250,000			100%	5,000,000
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	WOTU	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	24 kali	4,250,000	Pendapatan Daerah		24 kali	5,000,000
7	01	05		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	24,048,689			100%	45,838,949

7.01.05.2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	24,048,689				45,838,949
7.01.05.2.01.08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	WOTU	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	24,048,689	Pendapatan Daerah		100%	45,838,949
7	01	06		Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	32,862,818			100%	54,168,773
7.01.06.2.01				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	100%	32,862,818			100%	54,168,773
7.01.06.2.01.01				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	WOTU	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	34 Dokumen	7,731,910	Pendapatan Daerah		34 Dokumen	10,411,910
7.01.06.2.01.11				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	WOTU	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	5,927,782	Pendapatan Daerah		100%	10,547,782

7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	WOTU	Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya	100%	15,203,126	Pendapatan Daerah		100%	27,209,081
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	WOTU	Jumlah desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan	1 Desa	4,000,000	Pendapatan Daerah		1 Desa	6,000,000
T O T A L					3,014,346,384				5,253,625,474



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan rencana kerja (RENJA) berpedoman pada renstra Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Kalaena merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENTRA) Kecamatan Wotu. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional, peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 Tahun 2017, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Adapun Alokasi Anggaran Kantor Kecamatan Wotu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Alokasi Anggaran Kantor Kecamatan Wotu Tahun 2022 (Permendagri 13
Tahun 2006)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3,014,346,384	

2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	24,714,885	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4,650,000	APBD
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4,179,885	APBD
04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,345,000	APBD
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	10,540,000	APBD
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,166,033,217	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	2,137,053,217	APBD
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 Dokumen	28,980,000	APBD
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	13,110,000	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	13,110,000	APBD
2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		13,580,000	
07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	13,580,000	APBD
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		20,312,300	
02	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	0	APBD
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	3,457,300	APBD
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	16,855,000	APBD
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		197,859,700	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	2,134,700	APBD
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 Jenis	6,525,000	APBD
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	5,950,000	APBD
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Eksamplar	3,500,000	APBD
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1500 Orang	72,675,000	APBD
09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	831 Kali	107,075,000	APBD
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		306,950,000	
01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	278,450,000	APBD

05	Pengadaan Mebel	0	0	APBD
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	28,500,000	APBD
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	0	APBD
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	0	APBD
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		247,916,282	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650 Lembar	7,142,400	APBD
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 Rekening	55,748,882	APBD
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	5,025,000	APBD
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14 Orang	180,000,000	APBD
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	23,870,000	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	8 Unit	13,395,000	APBD
05	Pemeliharaan Mebel	0 Unit	0	APBD
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	5,730,000	APBD
09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	4,745,000	APBD
10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	0	APBD
7.01.02	Program Pemyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	9,985,000	
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	9,985,000	
01	Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	0 Lembar	0	APBD
03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	150 Lembar	9,985,000	APBD
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	52,879,384	
2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	52,879,384	
01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0,38%	9,479,244	APBD
03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90 Orang	43,400,140	APBD
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	12,250,000	

2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	8,000,000	
01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kali	4,000,000	APBD
02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Kali	4,000,000	APBD
2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	4,250,000	
01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24 Kali	4,250,000	APBD
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	24,048,689	
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	24,048,689	
08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	24,048,689	APBD
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	32,862,818	
2.01	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	32,862,818	
01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Dokumen	7,731,910	APBD
11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	5,927,782	APBD
17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100%	15,203,126	APBD
18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Desa	4,000,000	APBD
TOTAL			3,146,372,275,-	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Wotu tahun 2022 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Kecamatan Wotu Tahun 2022, dengan mengintegrasikan dukungan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Wotu, Penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan isu-isu strategis khususnya di Kecamatan Wotu. Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Wotu dalam kurun waktu tahun 2022, sehingga upaya Kantor Kecamatan Wotu dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Wotu, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Renja Kecamatan Wotu Tahun 2022 disusun agar dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

Wotu, Agustus 2021
Plt. C A M A T,



ISKANDAR MUDA, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19751030 200803 1 001

1. LAMPIRAN I

Review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2022 (Permendagri 90 Tahun 2019) Kantor Kecamatan Wotu

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	PROGRAM	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	PROGRAM	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar			100%	3,014,346,384	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar			100%	3,836,625,578	
2.1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran & evaluasi tepat waktu		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	24,714,885	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran & evaluasi tepat waktu		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	25,780,180	
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dok.	4,650,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dok.	3,666,325	
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok.	4,179,885	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok.	4,179,885	

2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	5,345,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	4,500,000
2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10 Dok	10,540,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10 Dok	13,433,970
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	2,166,033,217	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	2,830,900,740
2.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan	Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24 Orang	2,137,053,217	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan	Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24 Orang	2,801,920,740
2.2.7	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun	Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dok	28,980,000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun	Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dok	28,980,000
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadministrasikan sesuai standar	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	13,110,000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadministrasikan sesuai standar	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	13,360,188
2.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dok	13,110,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dok	13,360,188

2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	13,580,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	21,175,880
2.4.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah perangkat daerah	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dok	13,580,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah perangkat daerah	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dok	21,175,880
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20,312,300	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	45,478,450
2.5.2	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33 Orang	15,000,000
2.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	3,457,300	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	5,583,450
2.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Orang	16,855,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Orang	24,895,000

2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	197,859,700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	422,648,900	
2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Jenis	2,134,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Jenis	3,394,600	
2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Jenis	6,525,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Jenis	13,285,000	
2.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	5,950,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	10,390,300	
2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Eksamp lar	3,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Eksamplar	6,600,000	
2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1500 Orang	72,675,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1500 Orang	95,900,00	
2.6.9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah yang diselenggarakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	831 Kali	107,075,000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah yang diselenggarakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	831 Kali	293,079,000	

2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	306,950,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	65,000,000	
2.7.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	278,450,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	0	
2.7.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	0	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	0	
2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	28,500,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	0	
2.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasaranana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasaranana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	65,000,000	
2.7.11	Pengadaan Sarana dan Prasaranana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaranana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasaranana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaranana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	0	

2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	247,916,282	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	245,131,240
2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650 Lembar	7,142,400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650 Lembar	9,581,240
2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayarkan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Rek.	55,748,882	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayarkan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Rek.	65,000,000
2.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	5,025,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	14,550,000
2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Orang	180,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Orang	156,000,000
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik desa penunjang urusan yang terpelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	23,870,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik desa penunjang urusan yang terpelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	167,150,000

2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	13,395,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	19,150,000
2.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	0
2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang dipelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Unit	5,730,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang dipelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	135,000,000
2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab yang dipelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	4,745,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab yang dipelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	13,000,000
2.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab yang dipelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab yang dipelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	0

2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%	9,985,000	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			100%	14,643,012	
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	9,985,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	14,643,012	
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah adminitrasi perizinan yang dikeluarkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0 Lembar	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah adminitrasi perizinan yang dikeluarkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0 Lembar	0	
2.4.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Volume sampah yang terangkut	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	150 Lembar	9,985,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Volume sampah yang terangkut	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	150 Lembar	14,643,012	
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan			100%	52,879,384	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan			100%	84,710,099	

3.02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	52,879,384	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	84,710,099	
3.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0,38%	9,479,244	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10%	16,309,244	
3.2.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa yang diberdayakan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90 Orang	43,400,140	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa yang diberdayakan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	49 Orang	68,400,855	
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil diselesaikan			100%	12,250,000	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil diselesaikan			100%	16,000,000	
4.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	4,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	6,000,000	

4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan social yang difasilitasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Kali	4,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan social yang difasilitasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Kali	6,000,000	
4.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Kali	4,000,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Kali	5,000,000	
4.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	4,250,000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	5,000,000	
4.2.1	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	24 Kali	4,250,000	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	24 Kali	5,000,000	

5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	24,048,689	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	45,838,949	
5.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	24,048,689	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	45,838,949	
5.2.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	24,048,689	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	45,838,949	
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku			100%	32,862,818	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku			100%	54,168,773	
6.02	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	32,862,818		Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	54,168,773	

6.2.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	34 Dok	7,731,910	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	34 Dok	10,411,910		
6.2.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	5,297,782	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	10,547,782		
6.2.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	15,203,126	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	27,209,081		
6.02	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1 Desa	4,000,000	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	6,000,000		
TOTAL						3,146,372,275	TOTAL						5,253,625,474	

2. LAMPIRAN II

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Wotu Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur (Permendagri 90 Tahun 2019)

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Program	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar				100%	3,014,346,275			100%	3,836,625,578
2.1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran & evaluasi tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	24,714,885	APBD		100%	25,780,180
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	3 Dok.	4,650,000	APBD		3 Dok.	3,666,325
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	2 Dok.	4,179,885	APBD		2 Dok.	4,179,885
2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	2 Dok	5,345,000	APBD		2 Dok.	4,500,000

2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	10 Dok	10,540,000	APBD		10 Dok	13,433,970
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	2,166,033,217	APBD		100%	2,830,900,740
2.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan	Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	24 Orang	2,137,053,217	APBD		24 Orang	2,801,920,740
2.2.7	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	12 Dok	28,980,000	APBD		12 Dok.	28,980,000
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadministrasikan sesuai standar	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	13,110,000	APBD		100%	13,360,188
2.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	4 Dok	13,110,000	APBD		4 Dok.	13,360,188
2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	13,580,000	APBD		100%	21,175,880
2.4.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah perangkat daerah	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	4 Dok	13,580,000	APBD		4 Dok.	21,175,880

2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	20,312,300	APBD		100%	45,478,450
2.5.2	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	0	0	APBD		33 Orang	15,000,000
2.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	4 Dokumen	3,457,300	APBD		4 Dokumen	5,583,450
2.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	3 Orang	16,855,000	APBD		3 Orang	24,895,000
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	197,859,700	APBD		100%	422,648,900
2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	9 Jenis	2,134,700	APBD		9 Jenis	3,394,600
2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	8 Jenis	6,525,000	APBD		8 Jenis	13,285,000

2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	3 Jenis	5,950,000	APBD		3 Jenis	10,390,300
2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	48 Eksamplar	3,500,000	APBD		48 Eksamplar	6,600,000
2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	1500 Orang	72,675,000	APBD		1500 Orang	95,900,000
2.6.9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah yang diselenggarakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	600 Kali	107,075,000	APBD		600 Kali	293,079,000
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	306,950,000	APBD		100%	65,000,000
2.7.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	1 Unit	278,450,000	APBD		0 Unit	0
2.7.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	0	0	APBD		0	0
2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	Unit	28,500,000	APBD		0	0

2.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasaranana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	0	0	APBD		1 Paket	65,000,000
2.7.11	Pengadaan Sarana dan Prasaranana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaranana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	0 Unit	0	APBD		0	0
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	247,916,282	APBD		100%	245,131,240
2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	650 Lembar	7,142,400			650 Lembar	9,581,240
2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayarkan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	48 Rek.	55,748,882	APBD		48 Rek.	65,000,000
2.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	3 Jenis	5,025,000	APBD		3 Jenis	14,550,000
2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	10 Orang	180,000,000	APBD		10 Orang	156,000,000

2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik desa penunjang urusan yang terpelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	23,870,000	APBD		100%	167,150,000
2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	8 Unit	13,395,000	APBD		8 Unit	19,150,000
2.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	0 Unit	0	APBD		0	0
2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang dipelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	8 Unit	5,730,000	APBD		8 Unit	135,000,000
2.9.9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab yang dipelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	1 Unit	4,745,000	APBD		1 Unit	13,000,000
2.9.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab yang dipelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	0 Unit	0	APBD		0	0

2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100%	9,985,000			100%	14,643,012
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	WOTU	100%	9,985,000	APBD		100%	14,643,012
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah adminitrasi perizinan yang dikeluarkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	WOTU	0	0	APBD		0	0
2.4.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Volume sampah yang terangkut	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	WOTU	150 Lembar	0	APBD		150 Lembar	14,643,012
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan				100%	52,879,384			100%	84,710,099
3.02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	WOTU	100%	52,879,384	APBD		100%	84,710,099

3.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	WOTU	0,38%	9,479,244	APBD		0,38%	16,309,244
3.2.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa yang diberdayakan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	WOTU	90 Orang	43,400,140	APBD		90 Orang	68,400,855
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil diselesaikan				100%	12,250,000			100%	16,000,000
4.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	WOTU	100%	8,000,000	APBD		100%	11,000,000
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan social yang difasilitasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	WOTU	12 Kali	4,000,000	APBD		12 Kali	6,000,000
4.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	WOTU	12 Kali	4,000,000	APBD		12 Kali	5,000,000

4.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	WOTU	100%	4,250,000	APBD		100%	5,000,000
4.2.1	Koordinasi/ Sinergi Dengan Peringkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	WOTU	24 Kali	4,250,000	APBD		24 Kali	5,000,000
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	WOTU	100%	24,048,689			100%	45,838,949
5.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	WOTU	100%	24,048,689	APBD		100%	45,838,949
5.2.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	WOTU	100%	24,048,689	APBD		100%	45,838,949

6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku				100%	32,862,818			100%	54,168,773
6.02	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	WOTU	100%	32,862,818	APBD		100%	54,168,773
6.2.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	WOTU	34 Dok	7,731,910	APBD		34 Dok	10,411,910
6.2.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	WOTU	100%	5,927,782	APBD		100%	10,547,782
6.2.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	WOTU	100%	15,203,126	APBD		100%	27,209,081
6.2.18	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	WOTU	1 Desa	4,000,000	APBD		1 Desa	6,000,000
TOTAL							3,014,346,384				5,253,625,474

3. LAMPIRAN III

Alokasi Anggaran Kantor Kecamatan Wotu Tahun 2022 (Permendagri 90 Tahun 2019)

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Program	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar				100%	3,014,346,384	
2.1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran & evaluasi tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	24,714,885	APBD
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	3 Dokumen	4,650,000	APBD
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	2 Dokumen	4,179,885	APBD
2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	2 Dokumen	5,345,000	APBD
2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	10 Dokumen	10,540,000	APBD

2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadministrasikan sesuai standar	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	2,166,033,217	APBD
2.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan	Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	24 Orang	2,137,053,217	APBD
2.2.7	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	12 Dokumen	28,980,000	APBD
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadministrasikan sesuai standar	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	13,110,000	APBD
2.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	4 Dokumen	13,110,000	APBD
2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	13,580,000	APBD
2.4.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah perangkat daerah	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	4 Dokumen	13,580,000	APBD
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	20,312,300	APBD

2.5.2	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	0	0	APBD
2.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	4 Dokumen	3,457,300	APBD
2.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	3 Orang	16,855,000	APBD
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	197,859,700	APBD
2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	9 Jenis	2,134,700	APBD
2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	8 Jenis	6,525,000	APBD
2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan dan digandakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	3 Jenis	5,950,000	APBD
2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	48 Eksamplar	3,500,000	APBD

2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	1500 Orang	72,675,000	APBD
2.6.9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah yang diselenggarakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	831 Kali	107,075,000	APBD
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	306,950,000	APBD
2.7.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	1 Unit	278,450,000	APBD
2.7.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	0	0	APBD
2.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	Unit	28,500,000	APBD
2.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasaranana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	0 Unit	0	APBD
2.7.11	Pengadaan Sarana dan Prasaranana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaranana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	0 Unit	0	APBD

2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	247,916,282	APBD
2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	650 Lembar	7,142,400	APBD
2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayarkan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	48 Rekening	55,748,882	APBD
2.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	3 Jenis	5,025,000	APBD
2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	14 Orang	180,000,000	APBD
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik desa penunjang urusan yang terpelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	100%	23,870,000	APBD
2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	8 Unit	13,395,000	APBD

2.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	0 Unit	0	APBD
2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang dipelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	8 Unit	5,730,000	APBD
2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab yang dipelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	1 Unit	4,745,000	APBD
2.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab yang dipelihara	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WOTU	0 Unit	0	APBD
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			WOTU	100%	9,985,000	APBD
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	WOTU	100%	9,985,000	APBD
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	WOTU	0 Lembar	0	APBD
2.4.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Volume sampah yang terangkut	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	WOTU	150 Lembar	9,985,000	APBD

3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan			WOTU	100%	52,879,384	APBD
3.02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	WOTU	100%	52,879,384	APBD
3.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	WOTU	0,38%	9,479,244	APBD
3.2.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa yang diberdayakan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	WOTU	90 Orang	43,400,140	APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil diselesaikan			WOTU	100%	12,250,000	APBD
4.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	WOTU	100%	8,000,000	APBD
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan social yang difasilitasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	WOTU	12 Kali	4,000,000	APBD
4.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	WOTU	12 Kali	4,000,000	APBD

4.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	WOTU	100%	4,250,000	APBD
4.2.1	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	WOTU	24 Kali	4,250,000	APBD
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	WOTU	100%	24,048,689	APBD
5.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	WOTU	100%	24,048,689	APBD
5.2.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	WOTU	100 %	24,048,689	APBD
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku			WOTU	100%	32,862,818	APBD
6.02	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	WOTU	100%	32,862,818	APBD

6.2.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	WOTU	34 Dokumen	7,731,910	APBD
6.2.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	WOTU	100%	5,927,782	APBD
6.2.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	WOTU	100%	15,203,126	APBD
6.2.18	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	WOTU	1 Desa	4,000,000	APBD
TOTAL							3,146,372,275	



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN	
WOTU TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra kantor Kecamatan Wotu	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Wotu	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	39
3.1. Telaahan Arah Kebijakan Nasional	39
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD	40
3.3. Program dan Kegiatan.....	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	55
BAB V PENUTUP	59
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Renja Kantor Kecamatan Wotu dan Pencapaian Renstra Kantor Kecamatan Kalaena s/d Tahun 2020 kab. Luwu Timur	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Wotu ..	19
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 (Permendagri 13 Tahun 2006)	23
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022	36
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Wotu Tahun 2022 dan perkiraan Maju tahun 2023 (Permendagri 13 Tahun 2006)	45
Tabel 4.1	Alokasi Anggaran Kantor Kecamatan Wotu Tahun 2022 (Permendagri 13 Tahun 2006)	55